

PLURALISME

*Sebuah perspektif yang mengedepankan
pembahasan-pembahasan dengan
penekanan terhadap pembuatan keputusan
dan transnasionalisme*

Dewi Triwahyuni

pemikiran pluralis mengenai hubungan internasional berdasarkan empat asumsi dasar, yaitu :

1. *nonstate actors* adalah entitas utama dan terpenting dalam politik dunia yang tidak dapat diabaikan.

Misalnya:

- IGO's dan INGO's
- MNC's

2. Negara bukan sebuah aktor tunggal (*unitary actor*).

→ Negara terdiri dari birokrasi-birokrasi individu, kelompok-kelompok kepentingan, dan individu-individu yang berusaha memformulasikan dan mempengaruhi politik luar negeri.

→ Pluralis menolak anggapan negara entitas terintegrasi dan tertutup (*impermeable*) terhadap kekuatan-kekuatan luar.

3. Pluralis menentang anggapan negara sebagai aktor rasional.

→ Bahwa dalam pembuatan keputusan negara tidak selamanya mampu rasional, karena proses pengambilan keputusan tersebut seringkali dihasilkan dari perselisihan (*clashes*), tawar menawar (*bergaining*), dan kompromistis (*compromise*) sehingga sulit untuk mencapai keputusan yang benar-benar rasional.

4. Agenda utama politik internasional pluralis adalah ekstensif (perluasan).

→ Pluralis menolak bahwa agenda politik internasional didominasi oleh isu-isu keamanan-militer.

Tetapi telah mengalami perluasan pada isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

INTERDEPENDENCE

- Pruralisme melihat interdependence sebagai bentuk ketergantungan yang memiliki efek timbal balik (dalam pengertian positif) diantara negara-negara dan aktor-aktor sehingga perlu dilakukan.
- Wacana ini yang kemudian memunculkan konsep “*International Regimes*”

- Yaitu; apapun isunya, baik perdagangan, finance, komunikasi, polusi lingkungan atau bahkan transfer teknologi sekalipun, pluralis melihat paling tidak ada kesempatan untuk membangun hubungan yang baik diantara unit-unit yang indenpenden. Mengelola suatu hubungan ketergantungan, akan melibatkan konstruksi seperangkat aturan, prosedur, dan asosiasi institusi atau international organization untuk mengatur/govern interaksi yang terjadi dalam wilayah isu ini. Hal inilah yang kemudian disebut kaum pluralis sebagai **International Regimes.**